

## ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG

### PERFORMANCE ANALYSIS OF THE LOCAL OWN REVENUE IS ASSOCIATED WITH REGIONAL EXPENDITURE ON GOVERNMENT OF BITUNG CITY

Oleh:

Kevin R.M. Mandey<sup>1</sup>

Tri Oldy Rotinsulu<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>1</sup>e-mail: [kevingvnmandey@yahoo.co.id](mailto:kevingvnmandey@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[o\\_rotinsulu@yahoo.com](mailto:o_rotinsulu@yahoo.com)

**Abstrak:** Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi, tujuan dan visi organisasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bitung yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan tahun anggaran 2006-2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis rasio, antara lain, (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektifitas, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah yaitu 102,38%. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja Pendapatan Asli Daerah pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Dan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, secara umum efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata pertumbuhan sebesar 95,70%.

**Kata kunci:** kinerja, rasio, ekuitas dana.

**Abstract:** Local Own Revenue is budgeted revenues in the local government budget from the local treasury which is the right of local governments in the fiscal year that does not need to be paid back by the region. Performance is the achievement of an activity in achieving the goals, mission, purpose and vision of the organization. The purpose of this study was to analyze financial performance of Local Own Revenue in Bitung city government, measured using financial ratio analysis of the fiscal year 2006-2010. The analytical method used is descriptive analysis method, using ratio analysis, among others: (1) the ratio of local financial independence, (2) the ratio of effectiveness, (3) the ratio of harmony, (4) the ratio of growth. Based on the results of this study concluded that the performance of Local Own Revenues in Bitung city government, judging from the level of independence, is still low and has a declining trend. Assessed on effectiveness, can be quite effective, because of the years 2006-2010 the Local Own Revenue income is 102.38 %. Judged by the level of harmony, is generally not synchronized. Judged by the level of growth, it is generally quite effective as of 2006-2010, the average growth was 95.70 %.

**Keywords:** performance, ratio, equity.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tujuan utama didirikannya suatu negara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu mencukupi kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu organisasi yaitu pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah, pusat maupun daerah diberi tugas dan wewenang dalam mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, serta berusaha untuk mewujudkannya. Dalam rangka menciptakan *good governance*, pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja terutama kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh demi terwujudnya tujuan pemerintahan daerah.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD merupakan suatu kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja, serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja. Penilaian kinerja dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Maka daripada itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik (Mardiasmo, 2002:299). Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi dalam setiap periodenya. Untuk itu digunakan beberapa rasio keuangan pada APBD, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, aktivitas keserasian dan pertumbuhan (Halim 2004:150-158). Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, sangat diperlukan adanya analisis terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan karena PAD merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bitung dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu; rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bitung. Rasio-rasio tersebut dapat menggambarkan kemampuan pemerintah untuk menilai kemandirian keuangan dalam membiayai pembangunan daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur aktivitas keserasian pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur pertumbuhan PAD, serta menilai perkembangan pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bitung yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk tahun anggaran 2006-2010.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut dikarenakan perhatian terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah saat ini lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Istilah Sektor Publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah public sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan definisi akuntansi sector public dari sudut pandang ilmu ekonomi. Mardiasmo (2002:2) menyatakan bahwa akuntansi sector public adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan public. Dari definisi tersebut, akuntansi sector public dapat diartikan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak public melalui pelayanan public yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah.

### Akuntansi Pemerintahan

Perkembangan dalam bidang akuntansi pemerintahan dimulai pada awal tahun 1991 yang ditandai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 476/KMK/01/1991 pada tanggal 21 Mei 1999 tentang system akuntansi pemerintah pusat. Perkembangan yang menyangkut masalah tersebut adalah semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi pemerintah semakin meningkat. Baswir (2000:7) mengatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang bertujuan tidak mencari laba. Kemudian Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, yaitu, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sector public dan swasta. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan tentang pengertian akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.

### Ruang Lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Menurut Saragih (2003:127), APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
5. Format Anggaran.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004:15-16), yaitu sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun



## Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 22 Ayat 1, pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD sendiri terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Saragih (2003:61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Halim (2004:67) mengatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah daerah yang berasal dari pajak. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh daerah kepada pribadi/badan untuk kepentingan pribadi. Menurut Halim (2004:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang meliputi objek pendapatan (1) bagian laba perusahaan milik daerah, (2) bagian laba lembaga keuangan bank, (3) bagian laba keuangan non-bank, (4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Halim (2004:69) adalah jenis pendapatan yang meliputi objek pendapatan (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (2) penerimaan jasa giro, (3) penerimaan bunga deposito, (4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

## Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua yang merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, belanja terdiri dari (1) belanja aparatur daerah, (2) belanja pelayanan public, (3) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, (4) belanja tidak tersangka. Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, terdapat 2 jenis belanja menurut kelompok belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya.

## Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran

Pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tercantum pernyataan No. 2 tentang Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Saat ini basis kas telah mengalami perubahan menjadi *cash towards to accrual*. Hal tersebut terdapat pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP khususnya PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006:274) menyatakan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan saran, misi, tujuan dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

## Penelitian Terdahulu

Rozalina (2008). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah APBD pada Provinsi Sumatera Barat. Penelitian tersebut menganalisis kinerja pengelolaan keuangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penggunaan data dalam analisis tersebut adalah APBD Provinsi Sumatera Barat dan laporan realisasi Sumatera Barat tahun 2003 -2006. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu melakukan pendekatan kuantitatif dengan melakukan rasio keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Persamaan dalam penelitian skripsi ini adalah melakukan analisis dengan menggunakan rasio keuangan. Sebaliknya, perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dan isi pembahasan karena pada pembahasan sebelumnya pada Provinsi Sumatera Barat. Kawatak (2009). Analisis Keefektifan dan Keefesienan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Anggaran Pembangunan Daerah Kota Manado. Dalam penelitiannya data yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah melakukan pendekatan kuantitatif dengan melakukan rasio keuangan, yaitu dengan mendeskripsikan angka-angka hasil perhitungan rasio keuangan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Kota Manado sudah efektif pada periode tahun 2002 – 2008 yang menunjukkan setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada isi teori dan pembahasan, karena objek pembahasan sebelumnya adalah pemerintah Kota Manado.

Marizka (2009). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Teknik analisis yang digunakan yaitu melakukan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis kinerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan sudah cukup baik pada periode tahun 2003 – 2007. Dilihat dari analisis varians, analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan yang menunjukkan setiap tahunnya target pendapatan dan belanja daerah selalu terealisasikan dengan adanya peningkatan kearah yang lebih baik. Persamaan dalam analisis ini adalah melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan isi pembahasan karena pada pembahasan sebelumnya tentang pemerintah Kota Medan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro 2003:124). Data dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data Kualitatif : adalah data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian/penjelasan dan tidak dapat diukur dalam skala numeric (angka).
2. Data kuantitatif: adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau diukur dengan skala numeric (angka).

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yaitu data laporan realisasi APBD Kota Bitung tahun anggaran 2006-2010, yang kemudian dijadikan data kualitatif.

### Sumber Data

Sumber data dibedakan atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer: data yang diperoleh langsung dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original
2. Data sekunder : data yang diperoleh melalui literature-literature yang ada, studi kepustakaan, serta pihak lain yang terkait yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumentasi dari perpustakaan yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan yang didapat langsung dari kantor Walikota Bitung.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data ini menggunakan data laporan realisasi APBD kantor Walikota Bitung.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui definisi operasional dan pengukuran variable adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Pendapatan Asli Daerah

## Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan tren data runtut waktu.

## HASIL PENELITIAN

Analisis Rasio keuangan pada APBD kota Bitung dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi terhadap anggaran tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan analisis tren data runtut waktu yang merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dengan menggunakan metode ini dapat diamati pertumbuhan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bitung dengan persamaan tren sebagai berikut:

$$Y' = a + b X$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan Rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

- Y' : Perkembangan kemandirian, keefektifan, keserasian dan pertumbuhan  
 Y : Variable tingkat kemandirian, keefektifan, keserasian dan pertumbuhan  
 a : Besarnya Y, ketika X = 0  
 b : Besarnya Y, jika X mengalami perubahan 1 satuan  
 X : Waktu  
 n : Jumlah

## Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Jadi rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara PAD dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Rasio kemandirian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut.



$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil analisis kemandirian pemerintah Kota Bitung diperlihatkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Termasuk sisa perhitungan tahun lalu)	Rasio Kemandirian
2006	10.242.334.515	278.483.147.306	3,68%
2007	10.178.349.951	349.109.415.688	2,92%
2008	17.392.736.282	375.398.978.278	4,63%
2009	16.822.773.814	407.259.303.378	4,13%
2010	18.163.528.961	476.194.497.417	3,94%

Sumber : Data kantor Walikota Bitung yang sudah diolah

### Rasio Keefektivan

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasar potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Hasil analisis efektivitas pemerintah Kota Bitung diperlihatkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Keefektifan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Keefektifan
2006	10.242.334.515	10.366.002.500	98,81%
2007	10.178.349.951	11.781.158.008	86,40%
2008	17.392.736.282	12.786.576.275	136,02%
2009	16.822.773.814	17.456.517.690	96,37%
2010	18.763.528.861	19.869.926.587	94,30%

Sumber : Data kantor Walikota Bitung yang sudah diolah

### Rasio Kekeragaman

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio belanja tidak langsung APBD} = \frac{\text{total belanja tidak langsung}}{\text{total APBD}} \times 100\%$$

Hasil analisis keserasian belanja tidak langsung pemerintah Kota Bitung diperlihatkan pada table 3.

**Tabel 3. Kesenjangan Belanja Tidak Langsung**

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Rasio Belanja Tidak Langsung
2006	215.776.901.452	257.714.998.484	83,73%
2007	243.602.370.291	323.387.591.111	75,33%
2008	287.386.205.855	366.960.420.078	78,32%
2009	298.977.031.704	397.263.093.217	75,26%
2010	343.331.542.956	459.724.036.794	74,68%

Sumber : Data kantor Walikota Bitung yang sudah diolah

Table 3 memperlihatkan presentase belanja tidak langsung yang dibandingkan dengan total APBD Kota Bitung setiap tahunnya dari tahun 2006 – 2010.

#### Rasio belanja langsung terhadap APBD

$$\text{Rasio belanja langsung APBD} = \frac{\text{total belanja langsung}}{\text{total APBD}} \times 100\%$$

Hasil analisis keserasian belanja langsung pemerintah Kota Bitung diperlihatkan pada Table 4.

**Tabel 4. Kesenjangan Belanja Langsung**

Tahun	Total Belanja Langsung	Total APBD	Rasio Belanja Langsung
2006	41.030.818.032	257.714.998.484	15,92%
2007	79.369.280.670	323.387.591.111	24,55%
2008	78.762.098.123	366.960.420.078	21,46%
2009	96.790.461.513	397.263.093.217	24,36%
2010	113.573.131.025	459.724.036.794	24,70%

Sumber : Data kantor Walikota Bitung yang sudah diolah

Tabel 4 memperlihatkan persentase belanja langsung yang dibandingkan dengan total APBD kota Bitung tahun 2006 – 2010.

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hasil analisis pertumbuhan pemerintah kota Bitung diperlihatkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi APBD	Rasio Pertumbuhan
2006	10.242.334.515	-
2007	10.178.349.951	99,38%
2008	17.392.736.282	170,88%
2009	16.822.773.814	96,72%
2010	18.763.528.861	111,54%

Sumber : Data kantor Walikota Bitung yang sudah diolah

#### Pembahasan

Tabel 1 memperlihatkan persentase kemandirian PAD kota Bitung setiap tahunnya, yang merupakan hasil perbandingan antara PAD dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman dari tahun 2006-2010. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian pemungutan PAD di kota Bitung tahun anggaran 2006-



2010 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah kota Bitung masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya PAD dari pemerintah kota Bitung. Dilihat dari hasil perhitungan kota Bitung pada tahun 2006, rasio kemandirian PAD kota Bitung sebesar 3,68 persen, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu atau sementara mengembangkan PAD untuk dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pada tahun 2007 rasio kemandirian kota Bitung adalah sebesar 2,92 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006), kemandirian kota Bitung mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. Pada tahun 2008 rasio kemandirian kota Bitung adalah sebesar 4,63 persen menunjukkan kinerja PAD kota Bitung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2007), kemandirian mengalami peningkatan 1,71 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari setiap komponen pada PAD, terutama pada lain-lain PAD yang sah meningkat tajam. Pada tahun 2009, rasio kemandirian keuangan daerah kota Bitung adalah sebesar 4,13 persen menurun sebesar 0,50 persen dari tahun sebelumnya (2008). Dan pada tahun 2010 rasio kemandirian keuangan daerah kota Bitung adalah sebesar 3,94 persen dengan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen. Walaupun terlihat bahwa PAD tahun 2010 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya (2009), namun itu dikarenakan belanja kota Bitung tahun 2010 lebih besar sehingga memerlukan bantuan pendapatan yang bukan berasal dari PAD. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi belanja kota Bitung ditahun berikutnya tanpa memerlukan bantuan yang bukan berasal dari PAD, pemerintah kota Bitung perlu melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi kurangnya pemasukan PAD.

Tabel 2 memperlihatkan persentase keefektifan PAD kota Bitung setiap tahunnya, yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi PAD dan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dari tahun 2006-2010. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemungutan PAD dikota Bitung tahun anggaran 2006-2010 berfluktuasi dan berkisar antara 86,40 persen sampai dengan 136,02 persen. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (2006-2010) pemungutan PAD telah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang telah ditetapkan berkisar diangka 100 persen. Pada tahun 2006 rasio efektivitas PAD kota Bitung sebesar 98,81 persen yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif karena rasio efektifitas lebih dari 90 persen. Efektifitas pemungutan PAD ini berasal dari komponen-komponen PAD yang direalisasikan hampir mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2007 rasio efektifitas PAD kota Bitung adalah sebesar 86,40 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya efektifitas PAD mengalami penurunan sebesar 12,41 persen. Hal tersebut terlihat dari realisasi PAD kota Bitung tahun 2007 yang mengalami penurunan pada pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2008 rasio efektifitas PAD kota Bitung adalah sebesar 136,02 persen menunjukkan kinerja PAD kota Bitung lebih efektif dari tahun sebelumnya (2007). Efektifitas PAD kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 49,62 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari setiap komponen pada PAD, sekalipun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2009 rasio efektifitas PAD kota Bitung sebesar 96,37 persen masih menunjukkan kinerja keuangan yang efektif walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2008). Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), tahun 2009 memiliki pendapatan pajak daerah yang jauh lebih tinggi. Dan pada tahun 2010 rasio efektifitas PAD kota Bitung turun sebesar 2,07 persen atau mencapai 94,30 persen. Ini dikarenakan realisasi PAD terhadap target PAD tahun 2010 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PAD terhadap target PAD tahun 2009. Namun hal ini tetap menunjukkan bahwa kinerja PAD kota Bitung sudah efektif karena rasio efektifitas lebih dari 90 persen atau hampir mencapai 100 persen.

Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa rasio keserasian dikota Bitung untuk tahun anggaran 2006 – 2010 dalam mengalokasikan dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung cenderung tidak merata karena pemerintah daerah kota Bitung mengalokasikan dananya lebih besar pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Terlihat pada tahun 2006 rasio keserasian kota Bitung pada belanja tidak langsung sebesar 83,73 persen sedangkan pada belanja langsung hanya sebesar 15,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak merata dan serasi karena tingkat presentase belanja langsung sangat kecil yang dapat mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Pada tahun 2007 rasio keserasian

keuangan daerah kota Bitung pada belanja tidak langsung sebesar 75,33 persen sedangkan pada belanja langsung sebesar 24,55 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006), keserasian keuangan daerah kota Bitung mengalami perbaikan yaitu dengan adanya peningkatan pada belanja langsung sebesar 8,63 persen dan penurunan pada belanja tidak langsung sebesar 8,4 persen. Pada tahun 2008 rasio keserasian keuangan daerah kota Bitung pada belanja tidak langsung sebesar 78,32 persen sedangkan pada belanja langsung 21,46 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya keserasian keuangan daerah kota Bitung mengalami penurunan karena belanja langsung menurun sebesar 3,09 persen dan belanja tidak langsung meningkat sebesar 2,99 persen.

Pada tahun 2009 rasio keserasian keuangan daerah kota Bitung pada belanja tidak langsung sebesar 75,26 persen sedangkan pada belanja langsung sebesar 24,36 persen, terjadi perbaikan dari tahun sebelumnya (2008) dengan adanya peningkatan pada belanja langsung sebesar 2,9 persen dan penurunan pada belanja tidak langsung sebesar 3,06 persen. Dan pada tahun 2010 rasio keserasian keuangan daerah kota Bitung pada belanja tidak langsung sebesar 74,68 persen sedangkan pada belanja langsung sebesar 24,70 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009), keserasian keuangan daerah kota Bitung lebih meningkat karena adanya peningkatan pada belanja langsung yaitu sebesar 0,34 persen dan penurunan pada belanja tidak langsung sebesar 0,58 persen. Dengan meningkatnya rasio keserasian pada belanja langsung dalam dua tahun terakhir, maka dapat dikatakan adanya keserasian pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Peningkatan tersebut diharapkan dapat terjadi ditahun-tahun berikutnya sehingga penyediaan sarana dan prasarana pada masyarakat dapat terealisasi, dan pemerintah daerah kota Bitung perlu juga melakukan pengawasan serta pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap dana yang akan dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 5 memperlihatkan tingkat pertumbuhan PAD kota Bitung dari tahun 2006-2010. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD kota Bitung tahun anggaran 2006-2010 berfluktuasi dan berkisar antara 96,72 persen sampai dengan 170,88 persen. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (2006-2010), pertumbuhan PAD memiliki kinerja yang baik. Pada tahun 2006 menuju 2007, rasio pertumbuhan PAD kota Bitung sebesar 99,38 persen. Dengan perhitungan presentase tersebut dapat diketahui dengan menelusuri potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2007 menuju 2008, rasio pertumbuhan PAD kota Bitung adalah sebesar 170,88 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007), pertumbuhan PAD kota Bitung menunjukkan kinerja keuangan yang sangat meningkat dengan adanya peningkatan sebesar 71,5 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari setiap komponen pada PAD. Pada tahun 2008 menuju 2009, rasio pertumbuhan PAD kota Bitung adalah sebesar 96,72 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan PAD kota Bitung mengalami penurunan sebesar 74,16 persen. Ini terlihat pada PAD tahun 2009 yang menurun dibandingkan dengan tahun 2008. Dan pada tahun 2010 rasio pertumbuhan PAD kota Bitung meningkat sebesar 14,82 persen atau mencapai 111,54 persen. Untuk itu perlu adanya usaha dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan PAD ditahun-tahun berikutnya agar dapat membiayai kebutuhan daerah, seperti mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja PAD Kota Bitung dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun, dimana dari tahun 2006-2010 rata-rata kemandirian hanya mencapai 3.86 persen, dan perkembangan per tahunnya 0,17 persen. Ini berarti Kota Bitung masih bergantung atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/provinsi maupun pinjaman.
2. Kinerja PAD dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan cukup efektif, karena dari tahun 2006-2010 rata-rata efektifitas PAD Kota Bitung yaitu 102.38 persen, dan perkembangan per tahunnya 0.095 persen. Ini menggambarkan kinerja yang baik pada PAD Kota Bitung.

3. Kinerja PAD Kota Bitung dilihat dari tingkat keserasian secara umum dapat dikatakan belum serasi, karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Terlihat dari tahun 2006 – 2010, rata-rata untuk belanja tidak langsung adalah 77.46 persen, sedangkan pada belanja langsung hanya 22.2 persen. Tetapi untuk mencapai keserasian, belanja langsung mengalami peningkatan dengan perkembangan setiap tahunnya 1.7 persen dari tahun 2006 – 2010, dan belanja tidak langsung mengalami perkembangan yang menurun -1.8 persen setiap tahunnya dari tahun 2006 – 2010. Presentase tersebut menunjukkan adanya perubahan untuk mendapatkan keserasian.
4. Kinerja PAD Kota Bitung dilihat dari tingkat pertumbuhan, secara umum dapat dikatakan cukup efektif karena dari tahun 2006-2010 rata-rata pertumbuhan PAD Kota Bitung yaitu 95.70 persen, dan perkembangan per tahunnya 22.04 persen. Ini menggambarkan kinerja yang baik, terutama pada PAD Kota Bitung.

## Saran

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu: pemerintah Kota Bitung sebaiknya meningkatkan kinerja PAD nya melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada untuk memaksimalkan PAD. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tertib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyetoran berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pemungutan PAD dan mengelola keuangan daerah oleh aparat yang terkait.
3. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPEF, Erlangga, Yogyakarta.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, cetakan Ketujuh, BPEF, Yogyakarta.
- Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Kadajtmiko. 2002. *Dinamika Sumber Keuangan Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Parahyangan, Bandung.
- Kawatak, Wulan. 2009. Analisis Keefektifan dan Keefisienan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Anggaran Pembangunan Daerah Di Kota Manado, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Tidak Dipublikasikan. Hal. 59-63.
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Airlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi bahasa Indonesia. Andi, Yogyakarta.
- Marizka, Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat*.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9556/1/10E00382.pdf>. Diakses pada 28 Oktober 2015. Hal. 61-66.
- Rozalina, Eka. 2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Barat, *Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat*.  
[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=39696](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39696). Diakses pada 28 Oktober 2015. Hal.1.



Saragih, J. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2003*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK/01/1991 tentang *Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

